

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandarmaju, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2014, *Ruang Lingkup Permasalahan Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kuffal, HMA, 2008, *Penerapan KUHP Dan Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.
- Mahmudah, Nunung, 2015, *ILLEGAL FISHING: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertosoewignjo, Sri Soemantri, 1987, *Persepsi terhadap Prosedur dan Sitem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, Alumni, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ngadijarno dkk, 2006, *LELANG Teori Dan Praktik*, Lembaga Pengkajian Keuangan Publik Dan Akuntansi Pemerintah, Jakarta.

- Ridwan, 2014, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- _____, 2006, *Mengenal Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Cet. 2. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Sianturi, Punama Tioria, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Pembelian Barang Tidak Bergerak Melalui Lelang*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1992, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Sumardjono, Maria, 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soemitro, Rochmat, 1987, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, PT. ERESKO, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitjio, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suparmono, Gatot, 2011, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suriasumantri, Jujur S, 1986, *Ilmu dalam Prespektif Moral, Sosial dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, Gramedia, Jakarta.

B. Jurnal/ Artikel/ Tesis-Disertasi

Ayu Hapsari, Dian, “Pelaksanaan Lelang Ikan Di TPI Klidang Lor, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah”, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2009.

Shandra, Yenny, “Pelaksanaan Lelang Eksekusi Terhadap Barang Sitaan Kayu *Illegal Logging* di KPKNL Pekanbaru”, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2008.

C. Peraturan Perundang-undangan

Vendu Reglement (Undang-undang Lelang) Stbl. 1908 No. 89.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Perairan dan Pulau-pulau Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1337).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1338).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 477).

Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tempat Pengelolaan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 1 Seri E).

Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 12 Seri E).

Surat Edaran Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor SE-1/KN/2015 tentang Percepatan Pelayanan Lelang Ikan Hasil Tindak Pidana Perikanan.

D. Internet

Afner Juwono, “Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Hukum”, <http://afnerjuwono.blogspot.co.id/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html?m=1> di akses pada tanggal 14 Mei 2016.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online: “Lelang”, <http://kbbi.web.id/lelang>, di akses pada tanggal 29 Februari 2016.

Flora Dianti, Hukum Online: “Apa Perbedaan Alat Bukti Dan Barang Bukti?”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti>, di akses pada tanggal 29 Februari 2016.

Frans H Winarta, “Konsekuensi Penenggelaman Kapal”, <http://nasional.sindonews.com/read/935809/18/konsekuensi-penenggelaman-kapal-1418270847>, di akses pada tanggal 15 April 2016.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Dukung Pemberantasan Illegal Fishing, Kemenkeu Percepat Lelang Ikan Hasil Rampasan“, <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/dukung-pemberantasan-illegal-fishing-kemenkeu-percepat-lelang-ikan-hasil-rampasan>, di akses pada tanggal 15 April 2016.

Wahyu Nugroho, “Tindakan Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* Di WPPRI”, <http://download.portalgaruda.org> , di akses pada tanggal 15 April 2016.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandarmaju, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2014, *Ruang Lingkup Permasalahan Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kuffal, HMA, 2008, *Penerapan KUHP Dan Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.
- Mahmudah, Nunung, 2015, *ILLEGAL FISHING: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertosoewignjo, Sri Soemantri, 1987, *Persepsi terhadap Prosedur dan Sitem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, Alumni, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ngadijarno dkk, 2006, *LELANG Teori Dan Praktik*, Lembaga Pengkajian Keuangan Publik Dan Akuntansi Pemerintah, Jakarta.

- Ridwan, 2014, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- _____, 2006, *Mengenal Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Cet. 2. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Sianturi, Punama Tioria, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Pembelian Barang Tidak Bergerak Melalui Lelang*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1992, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Sumardjono, Maria, 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soemitro, Rochmat, 1987, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, PT. ERESKO, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitjio, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suparmono, Gatot, 2011, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suriasumantri, Jujur S, 1986, *Ilmu dalam Prespektif Moral, Sosial dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, Gramedia, Jakarta.

B. Jurnal/ Artikel/ Tesis-Disertasi

Ayu Hapsari, Dian, “Pelaksanaan Lelang Ikan Di TPI Klidang Lor, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah”, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2009.

Shandra, Yenny, “Pelaksanaan Lelang Eksekusi Terhadap Barang Sitaan Kayu *Illegal Logging* di KPKNL Pekanbaru”, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2008.

C. Peraturan Perundang-undangan

Vendu Reglement (Undang-undang Lelang) Stbl. 1908 No. 89.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Perairan dan Pulau-pulau Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1337).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1338).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 477).

Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tempat Pengelolaan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 1 Seri E).

Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 12 Seri E).

Surat Edaran Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor SE-1/KN/2015 tentang Percepatan Pelayanan Lelang Ikan Hasil Tindak Pidana Perikanan.

D. Internet

Afner Juwono, “Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Hukum”, <http://afnerjuwono.blogspot.co.id/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html?m=1> di akses pada tanggal 14 Mei 2016.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online: “Lelang”, <http://kbbi.web.id/lelang>, di akses pada tanggal 29 Febuari 2016.

Flora Dianti, Hukum Online: “Apa Perbedaan Alat Bukti Dan Barang Bukti?”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti>, di akses pada tanggal 29 Febuari 2016.

Frans H Winarta, “Konsekuensi Penenggelaman Kapal”, <http://nasional.sindonews.com/read/935809/18/konsekuensi-penenggelaman-kapal-1418270847>, di akses pada tanggal 15 April 2016.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Dukung Pemberantasan Illegal Fishing, Kemenkeu Percepat Lelang Ikan Hasil Rampasan“, <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/dukung-pemberantasan-illegal-fishing-kemenkeu-percepat-lelang-ikan-hasil-rampasan>, di akses pada tanggal 15 April 2016.

Wahyu Nugroho, “Tindakan Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* Di WPPRI”, <http://download.portalgaruda.org> , di akses pada tanggal 15 April 2016.